BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang :

a. bahwa indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional pemerintah daerah, sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam rencana pembangunan daerah dan rencana strategis perangkat daerah;
b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, perlu indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Batang;
c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
8. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian darii berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen SAKIP.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
    a. memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik; dan
    b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

(1) Indikator Kinerja Utama terdiri atas:
    a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah; dan
    b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.
(2) Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
    a. menetapkan rencana Kinerja tahunan;
    b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
    c. menyusun dokumen penetapan Kinerja;
    d. menyusun laporan akuntabilitas Kinerja; dan
    e. melakukan evaluasi pencapaian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.
(3) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1) Bupati melaksanakan:
    a. pembinaan dan pengembangan;
    b. pengintegrasian Indikator Kinerja Utama; dan
    c. monitoring, evaluasi dan pengawasan,
    atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama.
(2) Bupati menugaskan Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan untuk mengintegrasian Indikator Kinerja Utama ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan untuk melaksanakan monitoring, evaluas,i dan pengawasan atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Juni 2026

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 5 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSTAMSIKIN,S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820407 200903 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
(RPJMD 2025 – 2029)

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab
1.	Mewujudkan Kabupaten Batang yang Mandiri Berdaya Saing dan Sejahtera	1	PDRB per Kapita (ADHK)					PDRB Per Kapita = PDRB ADHB / populasi PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar harga Berlaku Populasi = Jumlah Penduduk Regional	Sekretariat Daerah
		2	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)					Skor pilar ketahanan ekonomi ditambah skor pilar ketahanan sosial ditambah skor pilar ketahanan lingkungan dan pemerintahan	Sekretariat Daerah
		3	Angka Kemiskinan					Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan) dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100 persen	Sekretariat Daerah
				1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rata – rata geometrik dari 3 (tiga) dimensi utama yaitu usia harapan hidup (kesehatan), pengetahuan (Pendidikan), dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (standar hidup layak)	Sekretariat Daerah

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab
						2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 persen	Sekretariat Daerah
				2	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing Berbasis Industri	1	Pertubuhan Ekonomi	(Produk Domestik Bruto Tahun N dikurangi Produk Domestik Bruto Tahun sebelumnya (N-1) dibagi Produk Domestik Bruto Tahun sebelumnya (N-1) dikali 100 persen	Sekretariat Daerah
				3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(0,376 dikali Indeks Kualitas Air) ditambah (0,405 dikali Indeks Kualitas Udara) ditambah (0,219 dikali Indeks Kualitas Lahan)	Sekretariat Daerah
						2	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Tingkat bahaya atau ancaman bencana dikali Tingkat kerentanan social, ekonomi, fisik dan lingkungan dibagi Kapasitas atau kemampuan masyarakat/wilayah untuk menghadapi dan memulihkan diri dari bencana	Sekretariat Daerah
				4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Inovatif dan Mandiri Secara Fiskal	1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kemenpan RB dengan melihat pelaksanaan dua jenis Reformasi Birokrasi yaitu RB General dan RB Tematik. RB General memiliki bobot 100 RB Tematik memilki bobot 20 sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120	Sekretariat Daerah
						2	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) kabupaten/kota dibagi Belanja Pegawai kabupaten/kota	Sekretariat Daerah

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab
				5	Terwujudnya Kondisi Wilayah yang Semakin Kondusif	1	Indeks Harmoni Indonesia (IHal)	Pengukuran meliputi 4 (empat) dimensi yaitu Dimensi Ekonomi (mengukur tingkat kesejahteraan, kesearaan, dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi), Dimensi Sosial (berfokus pada hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat, termasuk tingkat keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan pengambilan keputusan publik), Dimensi Budaya (untuk menilai sejauh manakeberagaman budaya dihormati, dilestarikan dan dijadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat), Dimensi Agama (mencakup tingkat toleransi, kerukunan dan penghormatan terhadap kehidupan beragama).	Sekretariat Daerah

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG
(RPJMD 2025 – 2029)

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Dinas Kesehatan (Dinkes)					
1.		Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	1 Jumlah Kematian Ibu	Jumlah kematian perempuan yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau dalam masa nifas (42 hari setelah berakhirnya kehamilan), tanpa memandang lama kehamilandan tempat persalinan, yang disebabkan oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau cedera	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			2 Jumlah Kematian Balita	Jumlah anak yan dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam usia (0-59 bulan)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			3 Prevalensi Stunting	Jumlah balita pendek dan sangat pendek dibagi jumlah balita yang diukur Panjang dibagi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
					tinggi badan dikali 100 persen		
		Terkendalinya penyakit dan pembudayaan hidup sehat	1	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	Jumlah puskesmas dengan rata–rata capaian indeks SPM Hipertensi dan DM >80% dan sudah menerapkan peraturan dibagi 21 (duapuluh satu) puskesmas dikali 100 persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			2	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	Jumlah Puskesmas yang memenuhi keberhasilan TB >90%, penemuan kasus TB >90% dan minimal 2 (dua) dari : ODHIV dalam pengobatan ARV yang di tes viral load dengan hasil viral load tersupresi 95%, eradikasi frambusia, eliminasi malaria dibagi jumlah puskesmas dikali 100 persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Menguatnya kapasitas ketahanan kesehatan	1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 80% obat esensial dan imunisasi rutin lengkap dibagi jumlah puskesmas yang ada dikali 100 persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya pelayanan kesehatan dan tata kelola	1	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar adalah pustu, puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar sarana,	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
					prasarana, alat kesehatan (SPA) dan sumber daya manusia kesehatan dibagi jumlah keseluruhan fasyankes tahun 2024 dikali 100 persen		
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang kesehatan yang akuntabel, efektif dan berbasis data	1	Nilai SAKIP Dinkes	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dinkes	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)						
1		Meningkatnya layanan dan kualitas pendidikan dan kesetaraan yang merata, terjangkau dan berkelanjutan	1	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Jumlah jenis layanan SPM bidang Pendidikan yang tersedia dibagi jumlah tptal jenis layanan SPM bidang Pendidikan dikali 100 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2		Meningkatkan upaya pengelolaan, pelestarian, perlindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan daya saing daerah	1	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan, dikelola dan dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan, dikelola dan dilindungi dibagi jumlah total cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang tercatat dikalikan 100 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas berbasis teknologi informatika	1	Nilai SAKIP Disdikbud	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Disdikbud	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim		

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
					Evaluator PEKPP Internal Kabupaten		
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)						
1.		Terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang andal serta penataan ruang yang tertib dan berkelanjutan	1	Persentase infrastruktur wilayah (jalan, jembatan, drainase, irigasi, air minum, sanitasi dan bangunan Gedung) dalam kondisi baik	(Persentase jalan kondisi baik ditambah persentase drainase kondisi baik ditambah persentase irigasi kondisi baik ditambah persentase rumah tangga berakses air minum ditambah persentase rumah tangga bersanitasi ditambah persentase gedung yang laik fungsi) dibagi total komponen infrastruktur dikali 100 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			2	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi total panjang jalan kabupaten/kota dikali 100 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			3	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rata-rata Aspek Penilaian Kinerja Sistem Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			4	Persentase bangunan gedung negara yang layak fungsi	Jumlah gedung negara yang layak fungsi dibagi Jumlah bangunan gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab dikali 100 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dibagi jumlah rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
				terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	tangga seluruhnya dikali 100 persen		
			6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik layak dibagi jumlah rumah tangga seluruhnya di kabupaten dikali 100 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			7	Nilai Kinerja Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan (TURBINLAK) Penataan Ruang	Jumlah nilai aspek TURBINLAK penataan ruang dibagi 5 aspek TURBINLAK penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2		Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai SAKIP DPUPR	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPUPR	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP)						
1.		Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Kualitas Kawasan Permukiman	1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Jumlah Total KK dengan Akses Hunian Layak dibagi Jumlah KK dikali 100 persen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DPRKP
			2	Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Rumah dikali 100 persen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DPRKP
			3	Persentase luas kawasan kumuh	Luas total kawasan kumuh dikurangi luas kawasan kumuh yang ditangani dikali 100 persen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DPRKP

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
2.		Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan	1	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	Jumlah permasalahan yang ditangani dibagi Jumlah permasalahan yang masuk dikali 100 persen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DPRKP
3.		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi perangkat daerah	1	Nilai SAKIP DPRKP	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DPRKP
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPRKP	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DPRKP
	Dinas Sosial (Dinsos)						
1.		Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Persentase Populasi PPKS	Jumlah Populasi PPKS dibagi Jumlah Penduduk x 100%	Dinas Sosial	Dinas Sosial
2.		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dan Fasilitasi berbagai bantuan sosial yang berbasis pada pemberdayaan sosial dan ekonomi	1	Persentase PPKS yang diberdayakan kapasitasnya dalam peningkatan kesejahteraan sosial	Jumlah PPKS yang diberdayakan kapasitasnya/Jumlah PPKS) x 100%	Dinas Sosial	Dinas Sosial
3		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas berbasis teknologi informatika	1	Nilai SAKIP Dinsos	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dinas Sosial	Dinas Sosial
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dinsos	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)						
1.		Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan anak	1	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Hasil Rilis dari BPS	DP3AP2KB	DP3AP2KB
			2	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	(Jumlah kasus tahun sebelumnya (N-1) dikurangi Jumlah kasus tahun ini (N))/Jumlah	DP3AP2KB	DP3AP2KB

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
					kasus tahun sebelumnya (N-1) dikali 100		
2.		Terwujudnya ketahanan keluarga melalui pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.	1	Angka pertumbuhan penduduk per tahun/LPP	Hasil Rilis dari BPS	DP3AP2KB	DP3AP2KB
			2	Indeks Lansia Berdaya	Hasil rilis dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN	DP3AP2KB	DP3AP2KB
			3	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Hasil rilis dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN	DP3AP2KB	DP3AP2KB
3.		Meningkatkan kualitas layanan publik serta akuntabilitas kinerja pemerintahan	1	Nilai SAKIP DP3AP2KB	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	DP3AP2KB	DP3AP2KB
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) DP3AP2KB	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	DP3AP2KB	DP3AP2KB
	Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta)						
1.		Meningkatnya Ketersediaan pangan yang beragam, penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok	1	Ketersediaan bahan pangan utama beras (Ton)	Produksi Gabah Kering Panen dikurangi Angka susut (benih, pakan, tercecer, susut) dikonversi dengan rendemen beras 62,74%	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
			2	Ketersediaan bahan pangan utama jagung (Ton)	Produksi Jagung dikurangi Angka susut atau dikalikan dengan angka konversi jaguang 89%	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
			3	Cadangan pangan daerah (Ton)	Jumlah cadangan pangan di Kabupaten Batang	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
2		Meningkatnya produksi pertanian dan peternakan	1	Produksi komoditas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)		Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
				a. Padi (ton)	Jumlah produksi tanaman padi		
				b. Jagung (ton)	Jumlah produksi tanaman jagung		
				c. Bawang Merah (Kuintal)	Jumlah produksi tanaman bawang merah		
				d. Cabai Besar (Kuintal)	Jumlah produksi tanaman cabai besar		
				e. Kentang (Kuintal)	Jumlah produksi tanaman kentang		
				f. Kopi (Kg)	Jumlah produksi tanaman kopi		
				g. Teh (Kg)	Jumlah produksi tanaman teh		
				h. Kakao (Kg)	Jumlah produksi tanaman kakao		
				i. Kelapa (Kg)	Jumlah produksi tanaman kelapa		
			2	Persentase produksi hasil ternak (daging, telur, dan susu)	Capaian produksi hasil ternak tahun N dibagi target produksi hasil ternak tahun N dikali 100 persen	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
			3	Persentase hewan/ternak yang terobati	Capaian hewan ternak terobati pada tahun berjalan dibagi target capaian hewan ternak terobati dikali 100 persen	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
3.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dinas Pangan dan Pertanian	1	Nilai SAKIP Dispaperta	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dispaperta	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim		

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
					Evaluator PEKPP Internal Kabupaten		
	Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan)						
1.		Meningkatnya Persentase capaian Produksi Perikanan	1	Persentase capaian produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap dibagi target produksi perikanan tangkap dikali 100 persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	Persentase capaian produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya dibagi target produksi perikanan budidaya dikali 100 persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.		Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan bagi Masyarakat Kabupaten Batang	1	Persentase capaian tingkat konsumsi makan ikan	Realisasi capaian angka konsumsi makan ikan dibagi target angka konsumsi makan ikan dikali 100 persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.		Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dislutkanak	1	Nilai SAKIP Dislutkan	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dislutkan	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)						
1.		Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1	Rasio Kepemilikan dokumen dan pencatatan sipil Masyarakat Batang	Rata–rata jumlah persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk ditambah rata–rata persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil dibagi dua	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Disdukcapil	1	Nilai SAKIP Disdukcapil	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Disdukcapil	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)						
1.		Meningkatnya jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Batang	1	Persentase peningkatan perusahaan yang berinvestasi di Kab Batang	Jumlah perusahaan tahun n dikurangi Jumlah perusahaan tahun (n-1) dibagi jumlah perusahaan tahun (n-1) dikali 100 persen	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
2.		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik di DPMPTSP Kab. Batang	1	Nilai SAKIP DPMPTSP	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPMPTSP	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)						
1		Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1	Persentase layanan publik yang dilselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan publik dikali 100 persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
2		Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan daerah	1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Perhitungan Indeks keamanan informasi dapat dilakukan oleh BSSN atau melalui evaluasi internal sesuai dengan indeks keamanan informasi setiap satu tahun sekali	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
3		Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan	1	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
		dan evaluasi pembangunan daerah		dan evaluasi pembangunan daerah	menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dibagi jumlah OPD sebagai produsen data dikali 100 persen		
4		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan public Diskominfo	1	Nilai SAKIP Diskominfo	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Diskominfo	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)						
1		Meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100 persen	Dinas Ketenaga kerjaan	Dinas Ketenaga kerjaan
			2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak dibagi Jumlah Perusahaan dikali 100 persen	Dinas Ketenaga kerjaan	Dinas Ketenaga kerjaan
			3	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan dibagi jumlah seluruh penduduk bekerja dikali 100 persen	Dinas Ketenaga kerjaan	Dinas Ketenaga kerjaan
2.		Meningkatnya pemerataan persebaran penduduk dan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	1	Persentase transmigran yang berhasil ditempatkan	Jumlah Transmigran yang ditempatkan dibagi Jumlah kuota transmigrasi dikali 100 persen	Dinas Ketenaga kerjaan	Dinas Ketenaga kerjaan
3		Meningkatnya kualitas layanan publik serta akuntabilitas kinerja pemerintahan	1	Nilai SAKIP Disnaker	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dinas Ketenaga kerjaan	Dinas Ketenaga kerjaan

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Disnaker	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Dinas Ketenaga kerjaan	Dinas Ketenaga kerjaan
	Dinas Perhubungan (Dishub)						
1.		Meningkatnya kegiatan pengelolaan kelengkapan jalan	1	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Kelengkapan jalan yang telah terpasang dibagi kondisi ideal kelengkapan jalan yang seharusnya terpasang dikali 100 persen	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
2.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dinas Perhubungan	1	Nilai SAKIP Dishub	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dishub	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Disperpuska)						
1		Meningkatnya akses dan penggunaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat	1	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan dalam setahun baik onsite maupun online dibagi Jumlah penduduk kabupaten/kota pada satu tahun anggaran) dikali 100 persen	Disperpuska	Disperpuska
2		Meningkatnya pengelolaan arsip secara digital dan transparan yang mudah diakses oleh masyarakat serta pihak-pihak terkait	1	Tingkat transparansi informasi publik terkait pengelolaan arsip yang dapat diakses oleh masyarakat, termasuk arsip laporan keuangan dan administrasi pemerintahan	Jumlah arsip yang dapat diakses publik dibagi jumlah arsip yang dikelola pemerintah dikali 100 persen	Disperpuska	Disperpuska

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
3		Meningkatkan kualitas layanan publik serta akuntabilitas kinerja pemerintahan	1	Nilai SAKIP Disperpuska	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Disperpuska	Disperpuska
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Disperpuska	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Disperpuska	Disperpuska
	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM)						
1.		Meningkatnya Pertumbuhan dan Kualitas Koperasi Kab. Batang	1	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah total koperasi dikali 100 persen	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Disperindagkop dan UKM
2.		Meningkatnya daya saing UMKM	1	Presentase produk UMKM yang terfasilitasi	Jumlah UMKM yang terfasilitasi NIB, kemasan produk, halal, pemasaran pada tahun N dibagi jumlah UMKM tahun N dikali 100 persen	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Disperindagkop dan UKM
3.		Meningkatnya Retribusi terhadap PAD	1	Persentase retribusi pasar terhadap PAD	Jumlah retribusi pasar dibagi PAD Kabupaten Batang dikali 100 persen	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Disperindagkop dan UKM
4		Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	1	Proporsi jumlah Industri kecil dan menengah	(Jumlah industri kecil ditambah jumlah industri menengah) dibagi total jumlah industri keseluruhan dikali 100 persen	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Disperindagkop dan UKM
5		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Disperindagkop	1	Nilai SAKIP Disperindagkop dan UKM	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Disperindagkop dan UKM
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Disperindagkop dan UKM	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Disperindagkop dan UKM
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades)						
1			1	Persentase Desa Mandiri di Kab. Batang	Jumlah desa dengan status Desa Mandiri pada	Dispermades	Dispermades

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
		Meningkatkan Status Kemandirian Desa di Kabupaten Batang			tahun n dibagi jumlah seluruh desa di Kabupaten Batang dikali 100 persen		
			2	Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya di Kabupaten Batang	(Jumlah peningkatan desa tertinggal naik ke berkembang+desa berkembang naik ke maju+ desa maju naik ke mandiri) dibagi jumlah total desa di Kabupaten Batang dikali 100 persen	Dispermades	Dispermades
2		Meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	1	Persentase PKK aktif	Jumlah PKK yang memenuhi kriteria aktif dibagi jumlah total PKK yang terdaftar dikali 100 persen	Dispermades	Dispermades
3		Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja Dispermades	1	Nilai SAKIP Dispermades	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dispermades	Dispermades
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dispermades	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Dispermades	Dispermades
	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora)						
1.		Meningkatnya pembangunan keolahragaan dan prestasi pemuda	1	Persentase prestasi pemuda berprestasi	(Jumlah pemuda berprestasi dibagi jumlah total pemuda) dikali 100	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2.		Meningkatnya daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	1	Rata-Rata Lama Menginap wisatawan	Total jumlah wisatawan yang menginap dibagi total malam menginap	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3		Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	1	Nilai SAKIP Disparpora	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Disparpora	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)						
1.		Terwujudnya Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	1	Indeks kualitas lingkungan air (IKA)	$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			2	Indeks kualitas lingkungan udara (IKU)	IKU = 100 -(50/0.9x(Ieu-0,1))	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			3	Indeks kualitas lingkungan tutupan lahan (IKL)	IKTL = 100-((84,3-(THx100))x50/54,3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2.		Meningkatnya pengelolaan sampah	1	Persentase penanganan sampah	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA tahun n-1 dibagi Jumlah timbulan sampah tahun n-1 dikali 100 persen	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
3		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	1	Nilai SAKIP DLH	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) DLH	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)						
1.		Meningkatnya kualitas perencanaan yang holistik, tematik dan terintegrasi untuk mencapai sasaran pembangunan daerah	1	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	(Jumlah program dalam APBD dibagi Jumlah program dalam RKPD) dikali 100 persen	Bapperida	Bapperida
2.		Meningkatnya ekosistem riset dan inovasi daerah yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan	1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai dari hasil evaluasi inovasi daerah oleh Kemendagri	Bapperida	Bapperida

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
3		Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	1	Nilai SAKIP Bapperida	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Bapperida	Bapperida
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Bapperida	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Bapperida	Bapperida
	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)						
1.		Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang sistematis	1	Persentase kepatuhan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan	(Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dibagi jumlah total Perangkat Daerah) dikali 100 persen	BPKPAD	BPKPAD
2.		Meningkatnya realisasi penerimaan PAD	1	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun berjalan dikurangi realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun lalu dibagi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Lalu dikalikan 100 persen	BPKPAD	BPKPAD
3.		Meningkatnya Pelayanan Publik	1	Nilai SAKIP BPKPAD	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	BPKPAD	BPKPAD
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) BPKPAD	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	BPKPAD	BPKPAD
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)						
1.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1	Indeks NSPK Manajemen ASN	Nilai NSPK = ∑Wi∑(Wi×Si)×100 (Si = Skor indikator ke-i berdasarkan evaluasi (skala 0-100 atau 1-5)	BKPSDM	BKPSDM

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
					Wi = Bobot indikator ke-i sesuai dengan tingkat kepentingannya ∑Wi = Total bobot seluruh indikator)		
2.		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara melalui penyelenggaraan diklat	1	Perbandingan antara Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dibagi total ASN dikali 100 persen	BKPSDM	BKPSDM
3		Meningkatnya Pelayanan Publik	1	Nilai SAKIP BKPSDM	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	BKPSDM	BKPSDM
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) BKPSDM	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	BKPSDM	BKPSDM
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol)						
1		Menciptakan stabilitas politik di masyarakat dan terpeliharanya suasana aman, nyaman dan tertib	1	Persentase demo tertangani	jumlah demo yang tertangani dibagi jumlah total kejadian demo dikali 100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2		Terpeliharanya persatuan dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik	1	Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	(Jumlah konflik sosial tahun berkenaan dibagi jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) dikali 100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah	1	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Badan Kesbangpol	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)						
1		Meningkatnya ketahanan wilayah dalam penanggulangan bencana	1	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
					di Kabupaten Batang dikali 100 persen		
2		Meningkatnya Kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan pelayanan publik yang cerdas, cepat, responsif	1	Nilai SAKIP BPBD	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) BPBD	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)						
1		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1	Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diselesaikan dibagi Jumlah gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaporkan dikali 100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
2		Meningkatnya waktu tanggap (*Response Time*) dalam pelaksanaan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran	1	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah penanganan kejadian kebakaran yang dilayani dalam waktu tanggap 15 menit dibagi Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
3		Meningkatnya pelayanan publik, kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah	1	Nilai SAKIP Satpol PP	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Satpol PP	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Inspektorat Daerah						
1		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan	1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan	Jumlah rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan yang telah ditindaklanjuti periode n dibagi Jumlah rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan periode n dikali 100 persen	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
2		Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
			2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Inspektorat Daerah	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
	Sekretariat Dewan (Setwan)						
1		Meningkatnya Pelayanan Dalam Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Wewenang dan Hak DPRD	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat DPRD	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Sekretariat Dewan	Sekretariat Dewan
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPRD	1	Persentase Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	JumlahKegiatan/Agenda AKD yang Terlaksana dibagi Jumlah Kegiatan/ Agenda yang Direncanakan dikali 100 persen	Sekretariat Dewan	Sekretariat Dewan
	Sekretariat Daerah (Setda)						
1		Menigkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten	Nilai hasil Evaluasi PEKPPP Kemenpan RB	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
			2	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai hasil Evaluasi Internal KOPD	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
2			1	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP BB	(Jumlah perangkat daerah dengan nilai	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			SAKIP BB dibagi jumlah perangkat daerah) dikali 100 persen		
			2	Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai hasil evaluasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
	Kecamatan						
1		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) kecamatan	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Kecamatan	Kecamatan
2		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	1	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan	Indeks desa di Kecamatan n dibagi Jumlah Desa di Kecamatan n	Kecamatan	Kecamatan
	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)						
1		Terlayaninya kesehatan masyarakat secara aman dan bermutu	1	Persentase Capaian Standard Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Nilai Rata-Rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
			2	Nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah	Skor hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Internal Kabupaten	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
			3	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Rumah Sakit Umum Daerah	Skor hasil evaluasi PEKPP oleh Tim Evaluator PEKPP Internal Kabupaten	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN